

# PENGARUH IMPLEMENTASI SEED BILL ACT 2004 TERHADAP GERAKAN SOSIAL PETANI KAPAS DI INDIA TAHUN 2004 - 2010

Ni Nyoman Clara Listya Dewi<sup>1)</sup>, D.A Wiwik Dharmiasih<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [nyomanclara@gmail.com](mailto:nyomanclara@gmail.com)<sup>1</sup>, [wiwikd@gmail.com](mailto:wiwikd@gmail.com)<sup>2</sup>,

[kawitriresen@gmail.com](mailto:kawitriresen@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The increasing demand of the world market for Indian cotton, made the Indian Government issued a policy regulating the production, distribution, and management of cotton seeds called the Seed Bill Act 2004. After the implementation of Seed Bill Act 2004, problems arose directly related to the life of Indian cotton farmers. The Seed Bill Act 2004 is considered do not reflect the interest of Indian cotton farmers. This study analyzes the phenomenon through the response of cotton farmers after the implementation of the Seed Bill Act 2004. This study was analyzed by qualitative descriptive method and also using public policy and Intermestic concept. The data in this study were obtained from various sources such as books, journals, and other sources directly related to this research. The tempus of the study is the years 2004 - 2010. This research found that the obligation of seed certification and the inclusion of GMO seeds in the Seed Bill Act 2004 gave the bad impact on the social and economic life of cotton farmers that resulting respons up to form mass suicide.*

**Keywords:** Cotton Seed, Seed Bill Act, Response, Transgenic Seed

## 1. PENDAHULUAN

India merupakan salah satu negara yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian India mampu memberi masukan sebesar \$1185,79 juta atau 6,1 persen untuk GDP (Gross Domestic Product). Angka tersebut mampu melebihi rata-rata GDP dunia ("Statistictimes," 2015). Salah satu sektor pertanian India yang berkembang pesat adalah pertanian kapas. Pertanian kapas menyumbang sebesar empat persen GDP negara dan sebanyak 14 persen untuk produksi dalam sektor industri. Selain itu,

sektor pertanian kapas juga menyumbang sebesar 11 persen dari total ekspor produk pertanian India dan mampu menyerap 20 persen tenaga kerja serta mendapatkan 16 persen modal untuk mengembangkan industri (Smriti Chand, n.d).

India juga dikenal sebagai salah satu penghasil kapas terbaik di dunia. Kapas-kapas yang dihasilkan banyak dijual ke negara-negara seperti Mesir, Bangladesh, Taiwan dan beberapa negara barat lainnya. Kapas-kapas tersebut menjadi bahan produksi industri pakaian kelas dunia seperti H&M, Gap, Nike dan Reebok (India Brand Equity Foundation,

2015). Permintaan terhadap kapas di India terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas industri tekstil dunia. Permintaan kapas yang terus meningkat dari pasar internasional menyebabkan budidaya kapas di India mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2014—2015, budidaya kapas di India mendekati angka 12,25 juta hektar dibandingkan tahun 2013—2014 yang hanya menyentuh angka 11,5 juta hektar (India Brand Equity Foundation, 2015). Produksi kapas India yang terus meningkat secara signifikan, membuat India dikenal sebagai produsen kapas terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok (The Statistic Portal, n.d.).

Permintaan kapas yang semakin meningkat menyebabkan Pemerintah India mengeluarkan kebijakan *Seed Bill Act 2004*. *Seed Bill Act 2004* adalah kebijakan benih yang mengatur mengenai produksi, distribusi dan penjualan benih kapas (Bill Blowup, n.d.). *Seed Bill Act 2004* merupakan kebijakan yang telah diamandemen dari kebijakan sebelumnya yang dinamakan *Seed Bill Act 1966*. Kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan asing seperti Monsanto untuk masuk ke India dan menggantikan benih-benih tradisional petani kapas India dengan benih-benih *hybrid*. Benih *hybrid* tersebut diproduksi langsung oleh perusahaan sekelas Monsanto dan dikenal dengan *GM Corps* berjenis *Bt Cotton*. Benih ini sengaja diperdagangkan di India dan ditujukan untuk menggantikan benih kapas yang

selama ini dikembangkan secara tradisional.

Pasca diberlakukannya kebijakan *Seed Bill Act 2004*, petani kapas India merasa dipersulit dalam melakukan kegiatan tani. Oleh karenanya banyak dari mereka melakukan protes untuk menentang kebijakan tersebut. Berbagai respons berupa gerakan perlawanan dimunculkan oleh para petani kapas. Salah satunya adalah dengan membentuk The All India Kisan Sabha (AIKS). AIKS merupakan perkumpulan dari petani kapas India yang melakukan gerakan penolakan terhadap kebijakan *Seed Bill Act 2004* (Ganguli, n.d.). Organisasi tersebut melakukan gerakan sosial dengan mengadakan kampanye kepada para petani yang tinggal di wilayah pedesaan dan distrik-distrik di negara bagian. Salah satu fenomena aksi perlawanan lainnya adalah tindakan bunuh diri massal petani kapas India. Peristiwa tersebut terjadi di kalangan petani kapas India dan telah memakan korban hingga mencapai seperempat juta jiwa terhitung dalam kurun waktu 13 tahun dari 1995—2009 (National Crime Report Bureau, 2012).

Munculnya gerakan perlawanan dan adanya fenomena bunuh diri massal menjadi keprihatinan sosial dan memiliki implikasi besar terhadap kualitas hidup dan nasib keluarga para petani kapas (Shiva, 2013). Selain itu pasca diimplementasikannya *Seed Bill Act 2004* petani kapas tidak mampu lagi mengembangkan pertanian seperti biasanya. Fenomena diatas menarik untuk

dilihat karena seperti yang dibahas sebelumnya bahwa sebagai negara yang mengandalkan sektor agrikultur, India dapat memaksimalkan potensi di bidang pertanian dengan memperhatikan kesejahteraan petani kapas. Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi *Seed Bill Act* 2004 terhadap adanya respons berupa gerakan sosial dari para petani kapas di India.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan dua artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian ini sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama merupakan artikel yang ditulis oleh Zaira Hussain yang berjudul *The Effect of Domestic Politics on Foreign Policy Making* (2011). Tulisan tersebut menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Literatur kedua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Eghosa E. Osaghae (2008) yang berjudul *Social Movements and Rights Claims: The Case of Action Groups in the Niger Delta*. Tulisan ini menggambarkan kegagalan negara dalam mempertimbangkan faktor domestik dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang akan menyebabkan reaksi dari masyarakat domestik.

Artikel yang ditulis oleh Zaira Hussain (2011) membahas mengenai adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan suatu kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sistem politik negara, *rational choice* kepala negara, politik domestik dan faktor eksternal lainnya seperti media, opini publik dan kelompok

kepentingan. Hussain (2011) dalam tulisannya menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah suatu kebijakan yang ditentukan oleh kepala pemerintahan suatu negara dengan tujuan untuk mencapai agenda-agenda domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri adalah kebijakan yang juga dapat merepresentasikan agenda kepentingan nasional yang ingin dicapai negara dalam kesepakatan-kesepakatan internasional. Kebijakan luar negeri tidak lagi hanya memperhatikan hubungan antar negara saja, melainkan juga melihat pada peranan dari politik domestik. Sehingga, kebijakan luar negeri mengandung keseluruhan interaksi aktor diluar negara seperti individu-individu. Individu-individu inilah yang oleh Hussain (2011) disebut sebagai faktor politik domestik yang memainkan peranan penting dalam proses perancangan suatu kebijakan luar negeri.

Lebih lanjut Hussain (2011) juga menjelaskan bagaimana peran domestik dalam proses perancangan kebijakan luar negeri. Peran domestik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah partisipasi aktif masyarakat secara politik kepada penentu kebijakan menjadi hal yang penting dan kompleks karena setiap kebijakan luar negeri diharapkan mampu merepresentasikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional didapat dari adanya keseluruhan ide dan kebutuhan masyarakat yang ada didalam suatu negara. Sehingga, sebelum suatu kebijakan luar negeri dibuat, beberapa tahapan akan dilewati untuk melihat pentingnya peran politik domestik

dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Tahapan-tahapan itu seperti analisis kondisi lingkungan domestik pasca diberlakukannya kebijakan menyeleksi pilihan-pilihan strategis dalam pembuatant kebijakan, *rational choice* dari kepala pemerintahan sebagai penentu kebijakan.

Hussain (2011) dalam tulisannya menekankan pentingnya peran kepala pemerintahan dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh aktor diluar negara. Lebih lanjut Hussain (2011) menambahkan bahwa pada proses pembuatan kebijakan pada dasarnya sangat ditentukan oleh sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Ini dapat diartikan bahwa selain kepala negara yang berwenang sebagai penentu kebijakan, pengaruh opini publik atau kelompok-kelompok kepentingan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan. Hussain (2011) menggunakan contoh negara demokrasi yaitu India, yang mempertimbangkan suara domestik sebelum mengeluarkan kebijakan luar negeri. Kepala negara India sebelum memutuskan suatu kebijakan akan selalu memperhatikan konsensus pemerintahan dan juga opini publik. Ini juga dipengaruhi oleh anggapan yang menyatakan bahwa negara demokrasi sangat ditentukan oleh suara mayoritas. Keterlibatan masyarakat domestik dapat menjadi penentu berhasil tidaknya kebijakan luar negeri dalam politik internasional. Argumen Hussain (2011) membantu penulis untuk memahami pentingnya peran domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Konsep intermestik dapat menjadi konsep yang

mampu menjelaskan hubungan peran politik domestik dengan adanya kesepakatan internasional dalam suatu negara. Hal ini juga dapat membantu penulis untuk menggambarkan bagaimana *Seed Bill Act* sebagai kebijakan luar negeri India setidaknya dapat memperhatikan kepentingan peran petani kapas sebagai komponen dari masyarakat domestik. Namun Hussain (2011) tidak membahas respons yang mungkin terjadi apabila negara tidak mengindahkan kepentingan domestik dalam penentuan kebijakannya.

Pembahasan mengenai hal tersebut, penulis dapatkan dalam tulisan Tulisan kedua yang ditulis oleh Eghosa E. Osaghae (2008), menjelaskan adanya upaya perlawanan dari kelompok masyarakat terhadap pemerintah Nigeria. Perlawanan ini muncul sebagai akibat kebijakan pemerintah Nigeria terkait tambang minyak dikawasan Niger Delta yang justru malah merugikan penduduk lokal. Kebijakan Pemerintah Nigeria yang memberikan akses bagi perusahaan asing untuk eksploitasi tambang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan dan mempengaruhi aspek kehidupan penduduk lokal. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok perlawanan yang disebut sebagai kelompok militan.

Osaghae (2008) memaparkan bahwa munculnya respons dari masyarakat merupakan akibat dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tambang minyak yang tidak menguntungkan penduduk lokal. Aspek yang dirugikan tidak hanya terkait dengan kerusakan lingkungan

yang ditimbulkan. Aspek lainnya seperti politik, ekonomi dan sosial menjadi terpengaruh oleh keadaan tersebut. Oshaghe (2008) juga menjelaskan bahwa perlawanan yang dilakukan merupakan bagian dari hak mereka untuk mencari perlindungan, kesetaraan, dan salah satu bagian untuk bisa mempertahankan diri. Alasan tersebut membuat mereka berani untuk mengambil resiko berjuang dengan cara yang tidak sistematis.

Oshaghe (2008) menekankan pada tindakan perlawanan penduduk lokal di delta Nigeria yang berujung pada gerakan pertahanan diri seperti pembentukan kelompok militan dan aksi kekerasan. Penduduk disekitar delta Nigeria menunjukkan perlawanannya dengan membentuk *armed groups* oleh Isaac Adaka Boro ditahun 1966. Isaac Adaka Boro adalah pemimpin dari kelompok militan tersebut. Mereka lantas membentuk *Ijaw group* dan menyatakan kelompok mereka sebagai republik baru di Nigeria. Fokus problematika munculnya kejadian ini terletak pada adanya kebijakan Pemerintah Nigera pada sektor tambang. Pemerintah dianggap merugikan penduduk lokal dengan hanya mementingkan keuntungan yang banyak pada sektor tambang minyak.

Perlawanan penduduk dikawasan tambang minyak Nigeria dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Perlawanan yang mereka lakukan tidak sebatas pada tuntutan melalui cara-cara yang lumrah dilakukan. Mereka membentuk kelompok militan dan melakukan tindakan kekerasan. Oshaghe (2008) memaparkan bahwa

gerakan sosial ini merupakan respons yang *bottom up* atau dari bawah keatas dan juga perjuangan akar rumput (*grassroots struggles*). Respons masyarakat yang berujung pada terciptanya gerakan sosial, sangat bergantung kepada kemampuan kelompok masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan setidaknya dapat memperjuangkan kepentingan bersama, strategi dan tujuan bersama yang ingin dicapai.

Oshaghe (2008) juga menekankan pada gerakan sosial muncul karena adanya keadaan untuk memperjuangkan hak-hak yang terabaikan, bahkan oleh pemerintah negara sendiri. Karakter suatu gerakan sosial seperti munculnya tindak kekerasan, protes, kehancuran dan sebagainya, semata-mata merupakan tindakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalkan. Penduduk lokal dikawasan delta Nigeria merasa terpojokkan oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Hak-haknya sebagai warga negara yang kekayaan alamnya diambil, menjadi terganggu sehingga menimbulkan respons perlawanan.

Dari kedua tinjauan pustaka diatas, penulis mengkaji bahwa hubungan antara politik domestik dan kesepakatan internasional (intermestik) dalam proses perancangan kebijakan luar negeri menjadi prinsip yang cukup penting. Secara tidak langsung hal ini turut menjelaskan bagaimana hubungan dan keberpihakan negara melalui kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik. Tulisan Oshaghe (2008) tidak menjelaskan lebih

lanjut gerakan sosial selain ditunjukkan melalui gerakan perlawanan dapat juga bersifat ke dalam, artinya bahwa gerakan sosial bisa saja justru menimbulkan kerugian secara psikis masyarakat.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki (Cevilla, 1993). Penelitian ini menjelaskan bagaimana *Seed Bill Act 2004* dapat memicu respons yang berupa gerakan sosial dari para petani kapas di India, melalui interpretasi data-data atau informasi yang diperoleh peneliti. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, berita, laporan, situs resmi terkait isu penelitian.

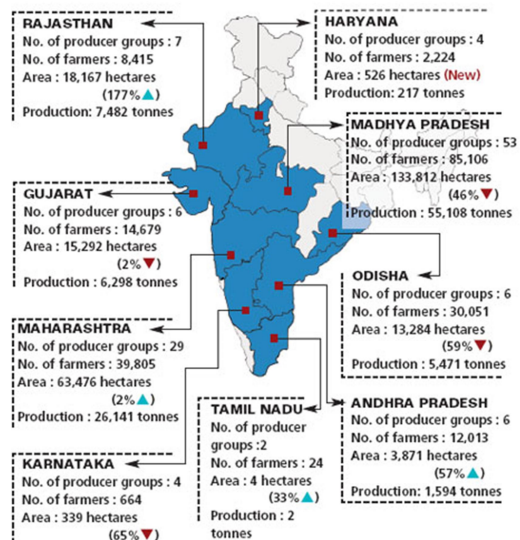
### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

India merupakan salah satu produsen kapas terbesar dunia yang telah merambah pasar internasional. Pertanian kapas di India menjadi salah satu sektor mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk India. Perkembangan sektor pertanian di India sendiri telah berkembang sejak lama, dimulai dari adanya Revolusi Inggris di tahun 1900-an (Santhanam dan Sundaram, n.d.). Saat itu, kapas India diminati oleh negara-negara di dunia karena dianggap memiliki kualitas

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wol dan sutera. Sehingga banyak pedagang dan produsen produk tekstil dunia mengimpor kapas dari India.

Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka meningkat pula intensitas produksi kapas India. Beberapa daerah di India merupakan produsen kapas yang aktif diperjualbelikan ke pasar internasional, diantaranya adalah; Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Orrisa, dan Tamil Nadu. Salah satu daerah penghasil kapas terbesar di India adalah Madhya Pradesh. Daerah tersebut di tahun 2010-2011 mampu

### COTTON STATES PRODUCE



menghasilkan 55.108 ton kapas (“DownToEarth Organic Thread, 2015”).

### India Cotton State Produce

Sumber: DownToEarth Organic Thread, 2015

Pertanian kapas mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di India. Tercatat sebanyak 4,5 juta petani di India menggantungkan sektor perekonomian dan mata pencahariannya dari pertanian kapas (Argawal, 2007). Sektor pertanian kapas India juga turut memberikan keuntungan bagi PDB India. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya impor kapas India ke beberapa negara di dunia seperti Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Eropa. Kapas India juga diminati oleh industri tekstil dunia. Beberapa perusahaan *fast fashion industry* seperti Wal-Mart, H&M, Gap, Levis, Nike, Reebok JC Penney, menjadi pengimpor utama bahan baku kapas dari India ("Indian Trade Portal", 2014).

Seiring dengan meningkatnya permintaan kapas, pemerintah India kemudian menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor terpenting dalam menunjang perkembangan ekonomi India. Oleh karenanya, pemerintah India lantas membentuk sebuah kebijakan khusus yang mengelola mengenai benih, termasuk benih kapas. Kebijakan tersebut bernama *Seed Bill Act 2004*. *Seed Bill Act 2004* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk memenuhi permintaan pasar dunia terhadap kapas India. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang bernama *Seed Bill Act 1966*. *Seed Bill Act 2004* membuat beberapa aturan diantaranya adalah, kewajiban petani kapas

untuk mendaftarkan benih, memberikan akses yang mudah bagi masuknya benih kapas *hybrid*, membuat adanya peningkatan harga kapas dipasaran, serta terganggunya pembudidayaan benih kapas tradisional.

Secara garis besar, *Seed Bill Act 2004* berisikan pertama, Pemerintah India dapat menciptakan iklim industri benih yang jauh lebih fasilitatif dan mudah. Kedua, melalui aturan ini dapat menambah varietas penggantian benih untuk berbagai jenis tanaman. Ketiga, mendorong aktivitas ekspor dan impor benih. Keempat, menciptakan kondisi yang baik bagi pengelolaan riset terhadap benih dalam negeri. Kelima, mengatur ketentuan bahwa setiap varietas benih yang dibudidayakan oleh petani kapas, harus teregistrasi dan memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah India. Keenam, *Seed Bill Act 2004* bertujuan untuk mengharmoniskan regulasi benih dengan regulasi benih lainnya diseluruh dunia.

Beberapa aturan dalam *Seed Bill Act 2004* bertujuan untuk memastikan bahwa pasar benih India terbuka untuk bisnis dan perdagangan berskala internasional (Sharma, 2005). Selain itu, *Seed Bill Act 2004* juga mengatur mengenai penggunaan benih kapas *hybrid* yang disebut dengan *Genetically Modified (GM) Corps* berjenis *Bt Cotton*. Pemerintah India meyakini bahwa sebuah teknik baru dalam produksi benih diperlukan untuk mempercepat produksi kapas. Hal tersebut kemudian diatur dalam *National Biotechnology Development Strategy*.

Namun, penerapan *Seed Bill Act* 2004 justru menimbulkan respons negatif dari para petani kapas India. Para petani kapas India menganggap, beberapa poin dalam aturan tersebut tidak memberikan keuntungan tetapi justru merugikan. Beberapa poin dalam *Seed Bill Act* 2004 yang dianggap memberatkan diantaranya; pertama, adanya kewajiban untuk registrasi dan sertifikasi benih; kedua, terganggunya pembudidayaan benih kapas; ketiga, mempermudah akses masuknya benih kapas hybrid; dan yang keempat mampu membuat terjadinya kenaikan harga benih kapas di pasaran. Selain itu, para petani mengalami kesulitan dalam meregistrasikan benih. Mereka harus melalui banyak ketentuan dan persyaratan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya; pertama, kepastian sumber benih kapas; kedua, membayar biaya registrasi melalui pengisian formulir yang bernama *Seed Plot*; ketiga, kelayakan lahan; dan keempat benih kapas harus melewati serangkaian *isolation requirement* ("My Agriculture Information Bank", 2015).

Para petani merasa dipersulit oleh adanya kewajiban untuk registrasi dan sertifikasi benih karena biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal. Selain itu, hadirnya benih *hybrid Bt Cotton* semakin mempersempit ruang gerak mereka dalam memproduksi benih secara mandiri. Hal ini disebabkan karena benih kapas *hybrid* masuk ke India melalui perusahaan multinasional yang telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah pusat. Berbeda dengan benih kapas yang dikembangkan

secara tradisional yang belum tersertifikasi sehingga sulit untuk berkembang. Sehingga pemerintah India menganggap bahwa benih *hybrid* dari MNC lebih layak untuk dikembangkan.

Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh para petani kapas, memicu terjadinya respons negatif dari petani kapas itu sendiri. Implementasi *Seed Bill Act* 2004 menimbulkan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial serta budaya para petani kapas India. Dampak dari segi ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya beban utang yang ditanggung oleh para petani kapas (International Farmers Suicide Crisis, n.d.). Utang-utang tersebut didapat dari meminjam sejumlah uang untuk membeli benih *hybrid* dan membayar sejumlah biaya administrasi untuk registrasi benih. Selain itu, meningkatnya bahan baku pertanian seperti pupuk, pestisida, dan biaya perawatan turut menjadi faktor yang mengharuskan para petani kapas meminjam sejumlah uang.

Dampak sosial yang dirasakan oleh petani kapas adalah terganggunya kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Beban ekonomi yang harus ditanggung membuat banyak anak-anak dari para petani yang memilih untuk bekerja dan tidak bersekolah. Bekerja di usia dini menjadi pilihan bagi anak-anak untuk dapat membantu perekonomian keluarganya. Dampak lainnya yaitu pada keberlangsungan pembudidayaan kapas secara tradisional. Masuknya benih *hybrid Bt Cotton* secara tidak langsung mematikan pembudidayaan benih kapas secara



tradisional. Pembibitan dan pembudidayaan benih secara tradisional di India merupakan budaya dan tradisi yang telah ada secara turun temurun. Hal lainnya juga disebabkan oleh adanya kebijakan registrasi benih yang membuat benih tradisional yang masih banyak belum tersertifikasi tidak dapat dikembangkan secara bebas.

Berbagai dampak yang ada pasca diimplementasikannya *Seed Bill Act 2004*, membuat munculnya berbagai respons negatif oleh para petani kapas lokal. Keadaan tersebut sesuai dengan yang ditulis oleh Hussain (2011), bahwa penting bagi pemerintah untuk melibatkan peran serta masyarakat domestik dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka dapat memicu respons yang negatif dari masyarakat itu sendiri. Osaghae (2008) juga memaparkan bahwa munculnya respons dari masyarakat merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memberikan keuntungan bagi penduduk lokal. Banyak petani kapas India kemudian melakukan gerakan perlawanan. Salah satu fenomena yang juga terjadi adalah tindakan bunuh diri massal yang dilakukan oleh petani kapas yang tidak sanggup menanggung biaya produksi kapas pasca diimplementasikannya *Seed Bill Act 2004*.

Berbagai respons ditunjukkan melalui gerakan perlawanan yang dilakukan oleh petani kapas, tokoh masyarakat, LSM hingga tokoh politik India. Salah satunya adalah The All India Kisan Sabha (AIKS). AIKS yang merupakan perkumpulan dari

petani kapas India yang melakukan gerakan penolakan terhadap kebijakan *Seed Bill Act 2004* (Ganguli, n.d.). Berbagai respons yang muncul dari para petani kapas di India semenjak diberlakukannya *Seed Bill Act 2004* menandakan bahwa terdapat kekurangan dalam kebijakan tersebut. Diabaikannya peran masyarakat domestik dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri berdampak pada kehidupan sosial, kondisi ekonomi serta budaya dari petani kapas India. Disamping itu, kondisi psikis petani kapas juga menjadi terganggu akibat beratnya beban yang harus ditanggung dalam memenuhi ketentuan yang ada dalam *Seed Bill Act 2004*. Melihat dari beberapa respons dan dampak negatif yang terjadi, pemerintah dianggap tidak dapat mendengarkan aspirasi dan keluhan petani kapas oleh adanya beberapa aturan baru dalam *Seed Bill Act 2004* (Sugam Pokharel, 2015). Hal tersebut sebagai penanda bagi pemerintah bahwa terdapat suatu permasalahan sistemik yang muncul apabila kebijakan yang dibuat tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## **5. KESIMPULAN**

Perumusan kebijakan luar negeri suatu negara harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat domestik. Peran masyarakat domestik menjadi sangat penting mengingat bahwa kebijakan luar negeri merepresentasikan agenda kepentingan nasional melalui kesepakatan-kesepakatan internasional. Peran masyarakat domestik dapat diwujudkan

melalui partisipasi aktif masyarakat. *Seed Bill Act* 2004 adalah salah satu kebijakan luar negeri India yang merepresentasikan agenda pemerintah India untuk memperluas pasar kapas ke pasar internasional. Kebijakan tersebut digunakan oleh pemerintah India sebagai jalan untuk meningkatkan investasi dalam kerjasama ekonomi di bidang perdagangan kapas. Pemerintah juga dapat menafaatkan kebijakan luar negeri untuk membuka pasar ke luar negeri terhadap ekspor dan investasi asing.

Pemerintah India menggunakan *Seed Bill Act* 2004 untuk memberikan peluang bagi perusahaan multinasional dalam memasarkan benih kapas *hybrid* ke India. Selain itu, beberapa poin dalam kebijakan tersebut dianggap mengancam kebebasan petani kapas lokal dalam memproduksi dan membudidayakan benih secara mandiri, sehingga memicu timbulnya respons negatif dari para petani kapas.

Gerakan perlawanan dari para petani kapas dan sebuah fenomena bunuh diri massal merupakan respons yang timbul pasca diimplementasikannya *Seed Bill Act* 2004. Respons negatif tersebut terjadi karena adanya persinggungan antara kebijakan luar negeri dengan kepentingan domestik. Kehadiran *Seed Bill Act* 2004 tidak mampu mengakomodir kepentingan petani kapas dan lebih menguntungkan perusahaan multinasional. Alasan lainnya adalah karena petani kapas merasa dirugikan dengan adanya aturan wajib untuk registrasi benih serta masuknya

benih *hybrid* yang mengancam keberlangsungan benih tradisional mereka. Keadaan tersebut dapat memicu respons yang jauh lebih besar berupa gerakan sosial masyarakat.

Kebijakan luar negeri yang diperuntukkan untuk mencapai kepentingan nasional dapat memperhatikan kepentingan masyarakat domestik. Berbagai cara yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pemerintahan negara sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, seperti; perlu adanya sosialisasi dari kebijakan yang dibuat kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat domestik sebagai masukan dalam perancangan sebuah kebijakan. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan prinsip *check and balances* dari masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat guna menghindari respons yang jauh lebih merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Bill Blowup The Seeds Bill 2011: *Seeking to Promote Use of Quality Seeds by Regulating Production, Distribution, Sale, Export and Import*. (2015). India: CUTS.
- Down To Earth Organic Thread. (2015). *India Cotton State Produce*, India: Author. Diakses pada 15 Desember 2016, dari <http://www.downtoearth.org.in/cov-erage/organic-thread-40329>

- Hussain, Z. (2011). *The Effect of Domestic Politics on Foreign Policy Making*, Singapore: E-International Relations Students. [http://www.cicr.org.in/research\\_notes/cotton\\_history\\_india.pdf](http://www.cicr.org.in/research_notes/cotton_history_india.pdf)
- Indian Trade Portal. (2014). *Indian Foreign Buyers*. Diakses pada 17 Maret 2017, dari <http://www.indiantradeportal.in>
- India Brand Equity Foundation. (2016). *Cotton Industry India*, India: Author. Diakses 7 November 2016, dari <https://www.ibef.org/exports/cotton-industry-india.aspx>
- My Agriculture Information Bank. (2015). Diperoleh pada 18 November 2016, dari <http://www.agriinfo.in>
- National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs (2015). *Accidental Death & Suicide in India*. India: Author.
- Osaghae, E. (2010). *Social Movements and Right Claims: The Case of Action Groups in the Niger Delta*. Diakses pada 24 Desember 2015, dari [https://www.iuokada.edu.ng/publications/Social\\_movements\\_and\\_rights\\_claims\\_the\\_case\\_of\\_action\\_groups\\_in\\_the\\_Niger\\_Delta.pdf](https://www.iuokada.edu.ng/publications/Social_movements_and_rights_claims_the_case_of_action_groups_in_the_Niger_Delta.pdf)
- Santhanam, Dv., & Sundaram, Dv. (n.d). *Agri-History of Cotton In India An Overview*, India: CICR. Diambil dari
- Sharma, D. (2010). *India Needs A Seed Liability Bill*, India. Diambil dari <http://devinder-sharma.blogspot.co.id/2010/11/india-needs-seed-liability-bill.html>
- Shiva, V. (2015). *How Monsanto Wrote and Broke Laws to Enter India*, India. Diakses 2 Desember 2015, dari [vandanashiva.com/?p=260](http://vandanashiva.com/?p=260)